

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi akuntabilitas pengelolaan dana APBDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Dari segi akuntabilitas hukum dan kejujuran, realisasi pengelolaan dana APBDes sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.. Akuntabilitas manajerial pemerintah desa ada yang sudah terlaksana dengan baik, tetapi belum ada web desa untuk bisa mengakses secara terbuka informasi lebih detail terutama terkait program-program yang dilakukan di Desa Jetis. Akuntabilitas program pembangunan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dilaksanakan mengacu pada program RPJMDes dan RKPDes berdasarkan hasil musyawarah desa. Saat ini ada program yang belum terealisasi dengan baik yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas kebijakan dana APBDes sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD. Akuntabilitas keuangan, laporan realisasi APBDes harus dipublikasikan.
2. Dampak yang dirasakan masyarakat jika jalan rusak belum diperbaiki itu akan mengganggu ketentraman dan ketidaknyamanan masyarakat untuk menggunakan fasilitas jalan tersebut. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi secara terbuka yang akan menjadikan masyarakat tidak mengetahui informasi tentang program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana APBDes.

B. Saran

Penelitian ini dilakukan hanya membahas tentang implementasi akuntabilitas pengelolaan dana APBDes berdasarkan dimensi akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas keuangan serta dapat mengetahui hidup masyarakat sudah sejahtera apa belum yang dilihat dari segi pembangunan desa. Hasil penelitian ini menyajikan pertanggungjawaban dan keterbukaan dari laporan realisasi pengelolaan dana APBDes yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melihat penerapannya di masyarakat serta mengungkap kesejahteraan masyarakat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak membahas nominal keuangan desa secara rinci.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan saat pengumpulan data dan hasil dari analisis penelitian. Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Desa Jetis diharapkan dapat mengsosialisasikan penggunaan pengelolaan dana APBDes kepada masyarakat, penambahan informasi berupa banner di setiap dusun, dan menambahkan sistem online atau web desa yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan masyarakat tidak harus ke kantor desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya adalah dapat menampilkan nominal keuangan desa secara terperinci dan mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnick Cityayun Septiandana, Gabriela Charteris, M. R. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun - Kabupaten Lumajang. *Prosiding The 5th Seminar Nasional Dan Call for Paper-2019 “ Kebaruan Dan Kode Etik Penelitian”*, 176–182.
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.
- Dkk, M. M. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*.
- I Wayan Purwa Astawa, I. G. A. N. B. (2019). *Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Peken Management on The Village Revenue and Expenditure*. 230–241.
- Johan Satriaajaya, Lilik Handajani, I. N. N. A. P. (2018). *Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Dari Pemerintah Kabupaten Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. 5(1), 1–21.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Tahun 2019
- Laurentya, V. M. (2017). *Diusulkan untuk Penelitian Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Pipit Juliana, P. W. (2017). *Akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa garon kecamatan kawedanan kabupaten magetan*. 169–183.
- Profil Desa Tahun 2019
- Puspawardani, W. (2014). *Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1–8.
- RPJM Desa Jetis Kecamatan Jetis Tahun 2017-2022
- RKP Desa Jetis Kecamatan Jetis Tahun 2019
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian*.
- Sujarweni, W. (2015a). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Sujarweni, W. (2015b). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*.
- Utami, B. P. (2017). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Transparansi dan Akuntabilitas Di Kelurahan Gondangsari Juwiring Klaten*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat